



LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS PERIKANAN KABUPATEN  
BENGKAYANG



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Kasihnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam penyusunan LKPJ ini, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang mengacu kepada laporan realisasi keuangan yang telah di susun dengan memperhatikan data-data yang ada. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan. Laporan ini merupakan gambaran kinerja Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun hal ini menjadi pedoman bagi kami untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Bengkayang, Maret 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BENGKAYANG



CHRISTOPHOL RENHART KILMANUN, S.Pi  
Pembina Tk. I  
NIP. 19711203 200212 1 006



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Dasar Hukum .....	8
1.2. Data Umum Perangkat Daerah.....	8
1.2.1. Jumlah Pegawai .....	8
1.2.2. Realisasi Pendapatan.....	9
1.2.2. Realisasi Belanja.....	10
<b>BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN (APBD-P) PERANGKAT DAERAH</b> .....	13
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	16
3.1. Pelaksanaan Urusan.....	16
3.2. Kebijakan Strategis yang dilaksanakan.....	21
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024.....	22
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b> .....	24
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	25





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Dasar Hukum

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

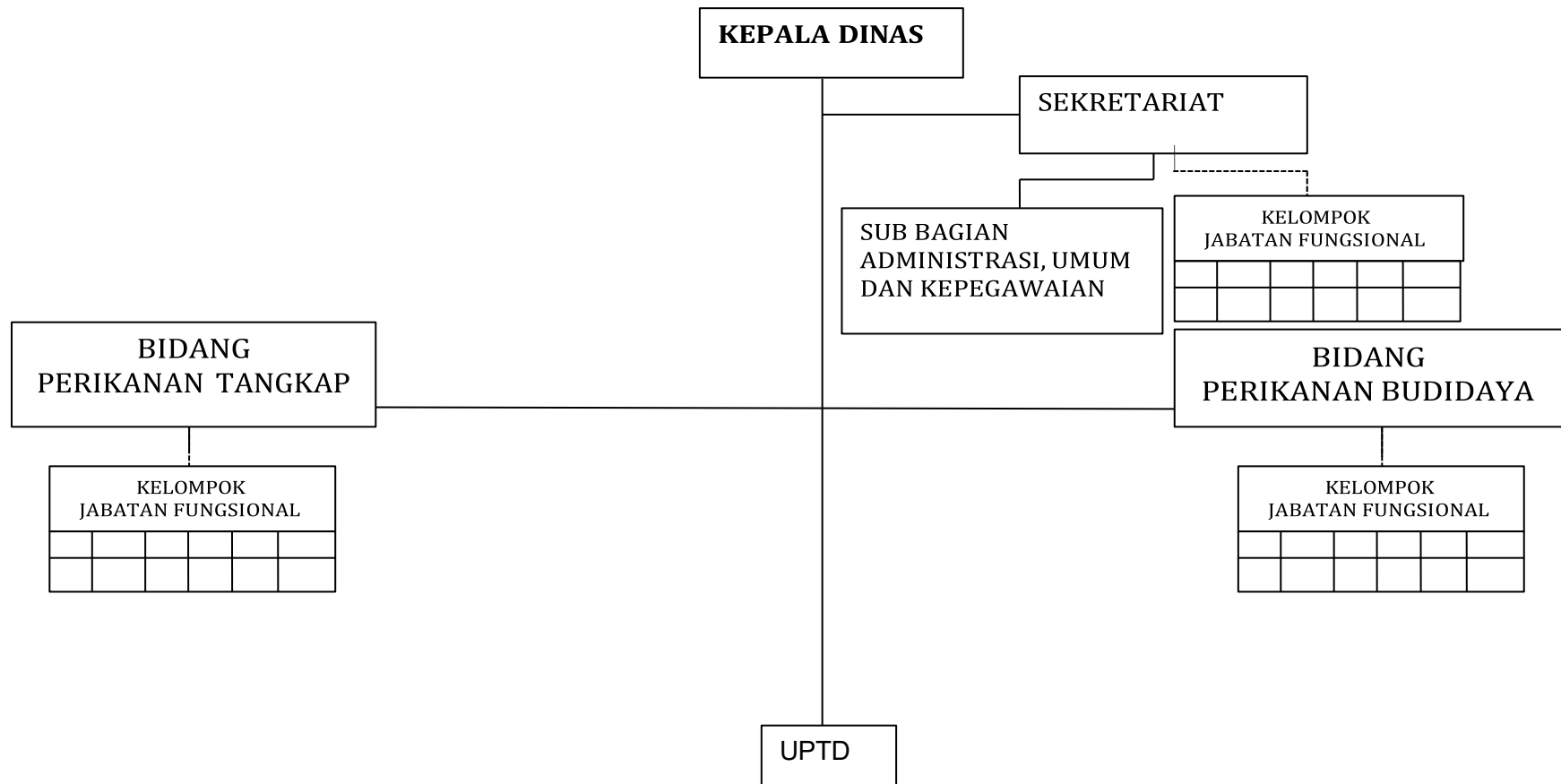
Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2022 Tanggal 8 Juli 2022 sebagai berikut:



Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 33 Tahun 2022 Tanggal 8 Juli 2022





Secara rinci tugas masing-masing kepala dalam struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

(1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengatur pengkoordinasian kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu

(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
- g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

(2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.



- (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - b. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
  - d. pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
  - f. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
  - g. penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
  - h. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
  - i. penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - j. penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
  - k. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan;  
dan
  - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.



### 3. Bidang Perikanan Tangkap

- (1) Bidang Perikanan Tangkap adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan
- (3) Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
  - b) pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
  - c) pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten;
  - d) pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  - e) pelaksanaan pendataan meliputi identifikasi, pendaftaran dan rekomendasi perizinan untuk kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah kabupaten;
  - f) pengelolaan data dan informasi perikanan tangkap;
  - g) pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
  - h) pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
  - i) pembinaan dan pendampingan nelayan dan kemitraan usaha perikanan tangkap;



- j) penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- k) pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasarannya skala mikro dan kecil;
- l) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Perikanan Tangkap; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### 4. Bidang Perikanan Budidaya

- (1) Bidang Perikanan Budidaya adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan
  - (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan budidaya dan pengembangan usaha dan produksi perikanan.
  - (2) Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perikanan budidaya;
    - b. fasilitasi pendaftaran dan rekomendasi teknis perizinan pembudidaya ikan dalam daerah kabupaten;
    - c. pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
    - d. penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam daerah kabupaten;
    - e. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana bidang perikanan budidaya;
    - f. pengelolaan data dan informasi perikanan budidaya;
    - g. peningkatan kelembagaan dan kapasitas pembudidaya ikan;
    - h. pelaksanaan usaha dan produksi sesuai peraturan yang berlaku.
    - i. pembinaan kelembagaan kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;



- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya sesuai peraturan yang berlaku;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perikanan budidaya; dan
- b) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan .

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

#### 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## 1.2. Data Umum Perangkat Daerah

### 1.2.1. Jumlah Pegawai

Dinas Perikanan didukung oleh jumlah pegawai, dengan kuantitas pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang berjumlah 30 (Tiga Puluh) orang, yang terdiri dari :

- PNS : 22 Orang
- PPPK : 8 Orang
- Tenaga Honorer : - Orang

Selain itu Dinas Perikanan juga didukung oleh Penyuluh Perikanan Pusat

- Penyuluh Perikanan Pusat (PNS) : 2 orang
- Penyuluh Perikanan Pusat ( PPPK) : 5 orang

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang di dukung oleh pegawai yang terdiri atas PNS (Gol I s/d IV) ,dan Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat

No.	Unit Kerja	Jenis Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat	
			Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Dinas Perikanan	PNS	Pembina Utama Muda/IV-c	1
			Pembina Tk. I/IV-b	1
			Pembina / IV-a	2
			Penata Tk. I/III-d	3
			Penata/III-c	1
			Penata Muda Tk. I/III-b	4
			Penata Muda/III-a	5
			Pengatur Tk. I/II-d	3
			Pengatur/II-c	2
			Pengatur Muda Tk. I/II-b	0
2.		PPPK		8
JUMLAH				30

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Dalam rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas,Sumber Daya Manusia Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang di dukung oleh Pegawai yang menduduki Eselon dan dengan latar belakang pendidikan yang terdiri atas :



Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	ESELON				Non eselon	PPPK
			Eselon II	Eselon III	Eselon IV/Jabatan Fungsional setingkat Eselon IV			
1.	Dinas Perikanan	30	1	3	3	16	8	

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan									
			S.3	S.2	S.1	D.4	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD
1.	Dinas Perikanan	30	-	2	12	-	7	-	-	8	-	1

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

### 1.2.2. Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan untuk pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 35.000.00,00 pada tahun berkenaan terealisasi sebesar Rp. 51.467.500,00 (147,05%) lebih Rp.16.467.500,00 sebagai berikut :

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	35.000.000,00	51.467.500,00	147,05
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000,00	51.467.500,00	147,05
4.1.02	Retribusi Daerah	35.000.000,00	51.467.500,00	147,05
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	35.000.000,00	51.467.500,00	147,05
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.000.000,00	5.667.500,00	56,67
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	10.000.000,00	5.667.500,00	56,67
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	25.000.000,00	45.800.000,00	183,20
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	25.000.000,00	45.800.000,00	183,20



### 1.2.3. Realisasi Belanja

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa DPA Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang tahun 2025 dengan anggaran dan realisasi untuk mencapai sasaran yang dibagi dalam 4 (delapan) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan. Penggunaan anggaran untuk mendukung tercapainya indikator sasaran tersaji dalam uraian sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Defenitif Belanja Langsung  
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>DINAS PERIKANAN</b>		Rp3.610.091.437,00	Rp2.813.284.610,00	77,93%
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3.237.473.937,00	Rp2.670.691.683,00	82,49%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp7.037.000,00	Rp6.978.000,00	99,16%
a.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp3.552.000,00	Rp3.525.000,00	99,24%
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.485.000,00	Rp3.453.000,00	99,08%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.354.613.007,00	Rp2.236.884.660,00	95,00%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.348.078.007,00	Rp2.233.659.660,00	95,13%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp6.535.000,00	Rp3.225.000,00	49,35%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp241.981.500,00	Rp91.853.872,00	37,96%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00%
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp93.904.500,00	Rp0,00	0,00%
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp32.996.000,00	Rp12.930.000,00	39,19%
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp21.000.000,00	Rp1.385.280,00	6,60%
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp15.000.000,00	Rp2.400.000,00	16,00%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp76.081.000,00	Rp75.138.592,00	98,76%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp34.951.000,00	Rp0,00	0,00%
a.	Pengadaan Mebel	Rp34.951.000,00	Rp0,00	0,00%



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp325.873.930,00	Rp235.915.651,00	72,39%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00	80,00%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp69.800.000,00	Rp34.577.741,00	49,54%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp251.073.930,00	Rp197.337.910,00	78,60%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp273.017.500,00	Rp99.059.500,00	36,28%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp72.094.000,00	Rp72.000.000,00	99,87%
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp12.876.500,00	Rp12.179.500,00	94,59%
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp86.125.000,00	Rp0,00	0,00%
d.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp31.180.000,00	Rp6.000.000,00	19,24%
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp70.742.000,00	Rp8.880.000,00	12,55%
B	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp118.149.000,00	Rp56.702.934,00	47,99%
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp20.346.000,00	Rp10.915.000,00	53,65%
a.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp20.346.000,00	Rp10.915.000,00	53,65%
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp25.458.000,00	Rp24.901.920,00	97,82%
a.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp25.458.000,00	Rp24.901.920,00	97,82%
3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp72.345.000,00	Rp20.886.014,00	28,87%
a.	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Rp72.345.000,00	Rp20.886.014,00	28,87%
C	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp211.758.216,00	Rp71.069.623,00	33,56%
1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp79.604.000,00	Rp51.831.923,00	65,11%
a.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp19.542.000,00	Rp8.925.000,00	45,67%
b.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp15.062.000,00	Rp6.565.000,00	43,59%



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
c.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp45.000.000,00	Rp36.341.923,00	80,76%
2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp132.154.216,00	Rp19.237.700,00	14,56%
a.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.487.966,00	Rp10.115.250,00	61,35%
b.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp115.666.250,00	Rp9.122.450,00	7,89%
D.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp42.710.284,00	Rp14.820.370,00	34,70%
1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp21.710.284,00	Rp7.355.370,00	33,88%
a.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Rp21.710.284,00	Rp7.355.370,00	33,88%
2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp21.000.000,00	Rp7.465.000,00	35,55%
a.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp21.000.000,00	Rp7.465.000,00	35,55%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp3.610.091.437,00</b>	<b>Rp2.813.284.610,00</b>	<b>77,93%</b>



## BAB II

### PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN (APBD-P) PERANGKAT DAERAH

Sumber pembiayaan untuk mendukung program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 bersumber Dana Alokasi Umum ( DAU ). Penganggaran dana untuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang mengacu kepada Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang setelah Perubahan APBD tahun 2025 meliputi :

Tabel 1.4.

Ringkasan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang  
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)
1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp3.541.571.437,00</b>
	Belanja Pegawai	Rp2.348.078.007,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.193.493.430,00
2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp68.520.000,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp68.520.000,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp3.610.091.437,00</b>



Adapun rekapitulasi belanja berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

NO/	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
<b>DINAS PERIKANAN</b>		<b>Rp 3.660.596.752,00</b>	Rp3.610.091.437,00	<b>-Rp50.505.315,00</b>
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3.168.953.937,00	Rp3.237.473.937,00	Rp68.520.000,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.000.000,00	Rp7.037.000,00	<b>-Rp2.963.000,00</b>
a.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 5.000.000,00	Rp3.552.000,00	<b>-Rp1.448.000,00</b>
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.000.000,00	Rp3.485.000,00	<b>-Rp1.515.000,00</b>
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.243.625.848,00	Rp2.354.613.007,00	Rp110.987.159,00
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.237.090.848,00	Rp2.348.078.007,00	Rp110.987.159,00
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp6.535.000,00	Rp6.535.000,00	Rp0,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp351.740.000,00	Rp241.981.500,00	<b>-Rp109.758.500,00</b>
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp96.701.000,00	Rp93.904.500,00	<b>-Rp2.796.500,00</b>
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp43.620.000,00	Rp32.996.000,00	<b>-Rp10.624.000,00</b>
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp35.000.000,00	Rp21.000.000,00	<b>-Rp14.000.000,00</b>
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp158.419.000,00	Rp76.081.000,00	<b>-Rp82.338.000,00</b>
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp35.673.500,00	Rp34.951.000,00	<b>-Rp722.500,00</b>
a.	Pengadaan Mebel	Rp35.673.500,00	Rp34.951.000,00	<b>-Rp722.500,00</b>
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp325.873.930,00	Rp325.873.930,00	Rp0,00
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp69.800.000,00	Rp69.800.000,00	Rp0,00
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp248.400.904,00	Rp251.073.930,00	Rp2.673.026,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp230.416.000,00	Rp273.017.500,00	Rp42.601.500,00
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp76.560.000,00	Rp72.094.000,00	<b>-Rp4.466.000,00</b>
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp15.000.000,00	Rp12.876.500,00	<b>-Rp2.123.500,00</b>
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp 30.000.000,00	Rp86.125.000,00	Rp56.125.000,00
d.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp31.180.000,00	Rp31.180.000,00	Rp0,00
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp77.676.000,00	Rp70.742.000,00	<b>-Rp6.934.000,00</b>



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

NO/	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
B	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp118.149.000,00	Rp118.149.000,00	Rp0,00
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp20.346.000,00	Rp20.346.000,00	Rp0,00
a.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp20.346.000,00	Rp20.346.000,00	Rp0,00
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp25.458.000,00	Rp25.458.000,00	Rp0,00
a.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp25.458.000,00	Rp25.458.000,00	Rp0,00
3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp72.345.000,00	Rp72.345.000,00	Rp0,00
a.	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Rp72.345.000,00	Rp72.345.000,00	Rp0,00
C	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp305.081.216,00	Rp211.758.216,00	-Rp93.323.000,00
1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp79.604.000,00	Rp79.604.000,00	Rp0,00
a.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp19.542.000,00	Rp19.542.000,00	Rp0,00
b.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp15.062.000,00	Rp15.062.000,00	Rp0,00
c.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00
2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp225.477.216,00	Rp132.154.216,00	-Rp93.323.000,00
a.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.487.966,00	Rp16.487.966,00	Rp0,00
b.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 208.989.250,00	Rp115.666.250,00	-Rp93.323.000,00
D.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp42.710.284,00	Rp42.710.284,00	Rp0,00
1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp21.710.284,00	Rp21.710.284,00	Rp0,00
a.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Rp21.710.284,00	Rp21.710.284,00	Rp0,00
2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00
a.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 3.660.596.752,00</b>	<b>Rp3.610.091.437,00</b>	<b>-Rp50.505.315,00</b>



### BAB III

## HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Pelaksanaan Urusan

Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan mempunyai peran penting dalam Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan terutama sektor Perikanan. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara Bupati Bengkayang dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dengan melaksanakan kegiatan yang anggaran setelah Perubahan sebesar Rp3.610.091.437,00 dengan rincian belanja operasi Rp3.541.571.437,00 dan Belanja modal Rp68.520.000,00

Dari total anggaran sebesar Rp3.610.091.437,00 anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp2.813.284.610,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.796.806.827,00 dengan realisasi keuangan sebanyak 77,93%

Program dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun yang direncanakan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 4 (delapan) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.

Adapun Pelaksanaan urusan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 adalah sesuai Tabel di bawah ini :



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

NO.	URUSAN PEMERINTAH HAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan Pilihan Keluatan dan Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<b>DINAS PERIKANAN</b> A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c Penyediaan Bahan Logistik Kantor d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a Pengadaan Mebel 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.610.091.437,00 Rp3.237.473.937,00 Rp7.037.000,00 Rp3.552.000,00 Rp3.485.000,00 Rp2.354.613.007,00 Rp2.348.078.007,00 Rp6.535.000,00 Rp241.981.500,00 Rp3.000.000,00 Rp93.904.500,00 Rp32.996.000,00 Rp21.000.000,00 Rp15.000.000,00 Rp76.081.000,00 Rp34.951.000,00 Rp34.951.000,00 Rp325.873.930,00	Rp2.813.284.610,00 Rp2.670.691.683,00 Rp6.978.000,00 Rp3.525.000,00 Rp3.453.000,00 Rp2.236.884.660,00 Rp2.233.659.660,00 Rp3.225.000,00 Rp91.853.872,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.930.000,00 Rp1.385.280,00 Rp2.400.000,00 Rp75.138.592,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp235.915.651,00	77,93% 82,49% 99,16% 99,24% 99,08% 95,00% 95,13% 49,35% 37,96% 0,00% 0,00% 39,19% 6,60% 16,00% 98,76% 0,00% 0,00% 72,39%	a Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki kompetensi bidang perikanan. b Adanya Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 900.1.14.1 / 355 / BPKAD-C tanggal 20 Juni 2025 Hal : Pengajuan Surat Perintah membayar (SPM) Ganti Uang (GU) dan Langsung (LS) dan Nomor : 900.1.14.1/2/BPK AD-C tanggal 22 Agustus 2025 Hal : Pengajuan Surat Perintah membayar(SPM) Ganti Uang (GU) dan Langsung (LS) yang memprioritaskan pengajuan SPM untuk kegiatan/belanja wajib/mengikat dan/atau bersumber Dana dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH Sawit,DAU SG, DBH-CHT dan Dana Insentif	a Perlu adanya penambahan personil pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dan menambah wawasan pengetahuan di bidang Kelautan dan Perikanan bagi sumberdaya manusia terutama bagi penyuluh perikanan, petugas lapangan Dinas Perikanan, nelayan pembudidaya ikan serta Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan. b Mengoptimalkan pelaksanaan Program dan Kegiatan terutama program dan kegiatan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar hasil perikanan c Karena keterbatasan anggaran untuk kedepan dipandang perlu untuk mengusulkan program bantuan sarana dan	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Fiskal sehingga pelaksanaan program yang mendukung sasaran strategis terhambat.	prasarana kepada pemerintah baik pusat maupun pemerintah provinsi serta mengoptimalkan pelaksanaan Program dan Kegiatan terutama program dan kegiatan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar hasil perikanan	
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00	80,00%	c Masyarakat nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan masih bergantung kepada bantuan sarana dan prasarana perikanan dari pemerintah .	d Perlu nya menyusun data bidang perikanan seperti data produksi perikanan, Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Nelayan dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta data sarana prasarana perikanan agar mudah untuk melakukan penanganan dan perencanaan serta penganggarannya yang dilakukan secara berkelanjutan.	
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp69.800.000,00	Rp34.577.741,00	49,54%	d Belum sempurnanya basis data dan informasi potensi sektor perikanan	d Perlu nya menyusun data bidang perikanan seperti data produksi perikanan, Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Nelayan dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta data sarana prasarana perikanan agar mudah untuk melakukan penanganan dan perencanaan serta penganggarannya yang dilakukan secara berkelanjutan.	
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp251.073.930,00	Rp197.337.910,00	78,60%	e Permodalan bidang usaha perikanan yang masih minim	e Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok	
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp273.017.500,00	Rp99.059.500,00	36,28%	f Koordinasi dan sinkronisasi Dinas Perikanan dengan Penyuluh Perikanan yang ada masih kurang optimal	e Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok	
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp72.094.000,00	Rp72.000.000,00	99,87%			
				b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp12.876.500,00	Rp12.179.500,00	94,59%			
				c Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp86.125.000,00	Rp0,00	0,00%			
				d Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp31.180.000,00	Rp6.000.000,00	19,24%			
				e Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp70.742.000,00	Rp8.880.000,00	12,55%			



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

NO.	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2 Pengembangan Perikanan Tangkap	B PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp118.149.000,00	Rp56.702.934,00	47,99%		Nelayan dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan agar dapat meningkatkan jumlah produksi perikanan. f . Mengoptimalkan Koordinasi dan sinkronisasi dengan Penyuluh Perikanan yang ada	
				1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp20.346.000,00	Rp10.915.000,00	53,65%			
				a Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp20.346.000,00	Rp10.915.000,00	53,65%			
				2 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp25.458.000,00	Rp24.901.920,00	97,82%			
				a Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp25.458.000,00	Rp24.901.920,00	97,82%			
				3 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp72.345.000,00	Rp20.886.014,00	28,87%			
				a Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Rp72.345.000,00	Rp20.886.014,00	28,87%			
			3 Pengembangan Perikanan Budidaya	C PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp211.758.216,00	Rp71.069.623,00	33,56%			
				1 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp79.604.000,00	Rp51.831.923,00	65,11%			
				a Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp19.542.000,00	Rp8.925.000,00	45,67%			
				b Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp15.062.000,00	Rp6.565.000,00	43,59%			
				c Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp45.000.000,00	Rp36.341.923,00	80,76%			
				2 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp132.154.216,00	Rp19.237.700,00	14,56%			
				a Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.487.966,00	Rp10.115.250,00	61,35%			
				b Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp115.666.250,00	Rp9.122.450,00	7,89%			
NO.			KEBIJAKAN		TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN		



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

1	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	4	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	6	7	8	9	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	10	TINDAK LANJUT REKOMEN DASI DPRD	11
			4	Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	D PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp42.710.284,00	Rp14.820.370,00	34,70%				
				1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp21.710.284,00	Rp7.355.370,00	33,88%				
				a Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	a Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Rp21.710.284,00	Rp7.355.370,00	33,88%				
				2 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp21.000.000,00	Rp7.465.000,00	35,55%				
				a Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	a Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp21.000.000,00	Rp7.465.000,00	35,55%				
						<b>Rp3.610.091.437,00</b>	<b>Rp2.813.284.610,00</b>	<b>77,93%</b>				





3.2. Kebijakan Strategis yang dilaksanakan

Kebijakan yang diambil adalah kebijakan keputusan atau tindakan kepala daerah yang menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
<b>NIHIL</b>			



### 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Masih kurangnya SDM yang memadai bidang perikanan di Kabupaten Bengkayang</li><li>2) Minimnya sarana dan prasarana di BBI yang standar dan ideal</li><li>3) Minimnya alat tangkap ikan para nelayan</li><li>4) Belum adanya Tempat Penjualan Ikan(TPI) di Kabupaten Bengkayang</li><li>5) Belum memadainya dermaga nelayan di Kabupaten Bengkayang</li></ol> <p>2. Rekomendasi :</p> <p>Bupati Bengkayang dalam hal ini perlu melakukan evaluasi dan kajian dalam hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang memadai bidang perikanan di Kabupaten Bengkayang</li><li>2) Perlu tambahan sarana dan prasarana di BBI yang standar dan ideal kedepannya.</li><li>3) Tambahan ketersediaan alat tangkap ikan para nelayan kedepannya</li><li>4) Penting dan perlu tempat strategis untuk dijadikan Tempat Penjualan Ikan(TPI) di Kabupaten Bengkayang, kedepannya.</li><li>5) Perlunya peningkatan terhadap dermaga bagi para nelayan di Kabupaten Bengkayang</li></ol>	<p>Rekomendasi :</p> <p>Terhadap Catatan dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2024 disampaikan tanggapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang memadai bidang perikanan di Kabupaten Bengkayang</li></ol> <p>Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menambah pegawai melalui pengadaan pegawai pada tahun 2022 dan 2025 sebanyak 6 orang dengan kualifikasi Pendidikan di bidang Kelautan dan Perikanan, selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang telah melakukan pendampingan dan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas SDM masyarakat perikanan dengan melaksanakan Program dan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</li><li>b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</li><li>c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Kualitas dan kuantitas SDM di bidang Perikanan Meningkat.</li><li>2) Sarana dan prasarana di BBI yang standar dan ideal</li><li>3) Ketersediaan alat tangkap ikan para nelayan</li><li>4) Terwujudnya Tempat Penjualan Ikan(TPI)</li><li>5) Pemanfaatan sentra nelayan untuk dermaga nelayan</li></ol>



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>2) Perlu tambahan sarana dan prasarana di BBI yang standar dan ideal kedepannya. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dalam memfasilitasi sarana dan prasarana di Balai Benih Ikan tertampung pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI telah dilaksanakan pada tahun 2020 dengan dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) sebesar Rp. 2.124.986.997,- dan Tahun 2024 sebesar Rp. 130.000.000,-</p> <p>3) Tambahan ketersediaan alat tangkap ikan para nelayan kedepannya Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dalam memfasilitasi ketersediaan alat tangkap ikan para nelayan tertampung pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.</p> <p>4) Penting dan perlu tempat strategis untuk dijadikan Tempat Penjualan Ikan(TPI) di Kabupaten Bengkayang, kedepannya.</p>	



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu sampai dengan data ini belum mempunyai Tempat Pelelangan Ikan. Dalam melaksanakan bongkar muat hasil tangkapan dan menjual hasil tangkapan nelayan memanfaatkan pelabuhan perikanan,tempat pendaratan ikan dan sentra nelayan yang ada di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.</p> <p>5) Perlunya peningkatan terhadap dermaga bagi para nelayan di Kabupaten Bengkulu</p> <p>Dalam melaksanakan aktivitasnya nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan memanfaatkan pelabuhan perikanan,tempat pendaratan ikan dan sentra nelayan yang dikelola oleh Kelompok Nelayan dengan jumlah 24 sentra nelayan.</p>	



BAB IV  
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN  
DAN PENUGASAN

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun 2025 tidak ada pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan.



## BAB V PENUTUP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang ini dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam Laporan ini diuraikan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 dan tindak lanjut rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa disamping keberhasilan tentunya masih banyak terdapat kekurangan, sehingga dalam Penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum dapat secara optimal memberikan kepuasan kepada semua pihak. Untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih segala dukungan, dorongan, partisipasi dan kerjasamanya.

Akhirnya kami berharap agar Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini kiranya dapat memberikan manfaat, terutama dalam merumuskan langkah kebijakan dan evaluasi pada tahun – tahun berikutnya, sehingga arah pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bengkayang dapat berkesinambungan dan menjadi lebih baik, terarah, terukur, akurat, serta tepat sasaran.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.